

KOMUNIKASI PARTISIPATIF APARAT KELURAHAN DALAM MENDUKUNG MAKASSAR KOTA DUNIA MELALUI PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN “MAKASSARTA’ TIDAK RANTASA”

Yamlikh Azikin¹, Iqbal Sultan², Muhammad Farid²

¹Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar

²Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Abstract

This research aimed (1) to investigate the participative communication of the village apparatus in implementing the government program of “Makassarta’ Tidak Rantasa”; (2) to identify the problem occurred the village level in the success of the enviromental Cleanliness Program of “Makassarta’ Tidak Rantasa”. The resesearch used a descriptive approach with the case study as the focus of the analysis. The techniques of data collection were the in-depth interviews, library studies, observation, and other physical equipment. The data analysis was carried out qualitatively, and the data validation used the source triangulation technique. The Research result revelaed that in implanting the Environmental Cleanliness Program “Makassarta’ Tidak Rantasa”, the Village apparatus needed to master the cleanliness program “Makassarta’ Tidak Rantasa”, touse the media of the circular letter, posters, and direct socialization to the scieties in order to spread the information about the program, i.e. always readyfor 24 hours, and 7 days a week to make sure that the program “Makassarta’ Tidak Rantasa”was running well. Because there was no standard context about the system of the program implementation, the village apparatus implemented the program according to their own opinion. However it was quite suprising that the output were the same. Though the village apparatus wer different personnel and different village.

Keywords: Village Civil Servant; Participatory Communication; The Government Program Makasarta Tidak Rantasa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk : 1). Mengetahui Komunikasi Partisipatif Aparat Kelurahan dalam Menjalankan Program Pemerintah kota Makassar Tidak Rantasa, 2). Mengidentifikasi Permasalahan yang terjadi pada tingkat kelurahan dalam keberhasilan Program kebersihan Lingkungan Makassar Tidak Rantasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan studi kasus sebagai fokus analisis. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*indepth interview*), studi kepustakaan, observasi dan perangkat-perangkat fisik. Analisis data dilakukan secara kualitatif-verifikatif dengan validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan Program Kebersihan Lingkungan Makassar Tidak Rantasa aparat kelurahan perlu menguasai Program Kebersihan Makassar Tidak Rantasa, Aparat kelurahan menggunakan media surat edaran ,poster, dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dalam menyebarkan informasi tentang program ini, selain itu partisipasi aparat kelurahan dalam menjalankan program ini yaitu selalu siap 24 jam, 7 hari seminggu untuk mengawal jalannya program kebersihan lingkungan makassarta tidak rantasa. Dikarenakan tidak adanya konteks yang baku tentang tata cara pelaksanaan program ini maka para aparat kelurahan mengimplementasikan program ini menurut pemikiran masing-masing namun walaupun pemaknaan program ini dilakukan oleh orang dan kelurahan yang berbeda akan tetapi hasil keluaran yang dilakukan oleh masing-masing kelurahan sama.

Kata kunci; Aparat kelurahan; Komunikasi partisipatif; Program Pemerintah “Makassarta Tidak Rantasa”

PENDAHULUAN

Kota Makassar yang memiliki luas areal 175,79 km² merupakan kota yang padat penduduk namun sistem tata ruang yang agak pelik dikarenakan sistem penataan kota tidak diperuntukkan pada fungsi wilayah. Hal ini yang menyebabkan semerawutnya sistem tata kelola kota, alasannya yaitu ada wilayah perumahan dan pertokoan berbaur menjadi satu. Sistem drainase yang kurang dikelola secara baik menyebabkan kota Makassar dihantui masalah banjir apabila musim hujan telah tiba. Masalah sampah adalah masalah klasik yang dihadapi oleh setiap kota di dunia. Makassar yang berpenduduk \pm 2 juta jiwa tidak dapat menghindari masalah persampahan di kotanya.

Kota Makassar telah membuat peraturan daerah tentang masalah sampah yaitu Perda kebersihan nomor 11 tahun 2011, di dalam perda tersebut terdapat peraturan mulai dari hak dan kewajiban warga kota Makassar sampai kepada denda yang di jatuhkan kepada warga apabila membuang sampah secara sembarangan.

Kata “Rantasa” merupakan bahasa lokal yang berarti Kotor, jorok, tidak teratur. namun dalam program Makassarta’ tidak rantasa diartikan secara luas yang bukan hanya sebatas mengartikan Rantasa itu sampah yang berserakan atau kanal dan got yang penuh sampah, tapi juga menata Ketidakteraturan atau kesemrawutan di instansi-instansi pemerintah seperti perilaku jorok korupsi, suap menyuap, dan calo-calo dalam berbagai bentuk pengurusan administrasi sehingga menciptakan Good Government.

Komunikasi adalah aktifitas dasar dari kehidupan manusia, dengan berkomunikasi manusia dapat berinteraksi dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia perlu berkomunikasi, tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi merupakan unsur penting bagi kehidupan

manusia. Sebagai konsekuensi makhluk sosial, setiap manusia akan melaksanakan kegiatan komunikasi bila ingin mengadakan hubungan dengan pihak lain. Oleh sebab itu, terjadinya komunikasi adalah sebagai konsekuensi hubungan sosial (Effendy, 2003). Menurut Rogers dalam Cangara (2012), komunikasi didefinisikan sebagai proses dimana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih, dengan maksud untuk merubah tingkah laku mereka.

Pentingnya komunikasi dalam kehidupan manusia tidak dapat di pungkiri lagi begitu halnya dalam suatu organisasi baik itu swasta maupun pemerintahan. Lancarnya sebuah komunikasi dalam organisasi maka organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik begitu pula sebaliknya apabila dalam organisasi komunikasinya tidak lancar maka dapat dipastikan organisasinya tidak berjalan dengan mulus. Pentingnya suatu informasi untuk disampaikan pada bawahan akan memberikan efek besar pada suatu dinas dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena pentingnya komunikasi dalam organisasi/lembaga maka perlu menjadi perhatian bagi para pengelolanya agar dapat membantu dalam pelaksanaan tugasnya.

Komunikasi yang efektif adalah hal yang penting bagi semua organisasi, oleh karena itu para pimpinan suatu organisasi ataupun instansi pemerintahan perlu memahami dan menyempurnakan kemampuan komunikasi mereka (Kohler *et al.*, 1981).

Pengertian organisasi ada beberapa macam pendapat. Scein dalam Rogers & Rekha (1976), mengatakan organisasi adalah koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hirarki otoritas dan bertanggungjawab. Organisasi merupakan sistem hubungan yang terstruktur yang mengkoordinasi usaha suatu kelompok untuk mencapai tujuan tertentu (Kohler *et al.*, 1981). Lain lagi menurut Wright (1977),

organisasi adalah bentuk sistem terbuka dari aktifitas yang dikoordinasikan secara bersama untuk mencapai satu tujuan yang bersama pula.

Dari ketiga pendapat diatas dapat dirumuskan bawa organisasi terdapat 3 hal yang sama yaitu : organisasi merupakan sistem, mengkoordinasi aktifitas dan mencapai tujuan bersama ataupun tujuan umum. Suatu pesan dalam organisasi mengalir dalam jalur resmi dan ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau fungsi pekerjaan maka pesan itu menurut pada jaringan komunikasi formal.pesan dalam jaringan komunikasi formal biasanya mengalir dari atas kebawah atau dari bawah ke atas atau dari tingkat yang sama atau secara horizontal.

Menurut Verhangen dalam Mardikanto (2003), menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab,dan manfaat. Theodorson dalam Mardikanto (1994), mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagi keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Menurut Ackoff dalam Achmad (1990), pembangunan partisipatif adalah suatu proses pembangunan ditentukan oleh apa yang orang-orang dapat lakukan dengan apa yang mereka miliki dalam memperbaiki kehidupannya.

Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka permasalahan sebagai

berikut:

1. Bagaimana Aparat kelurahan menjabarkanprogram kebersihan lingkungan Makassar' tidak rantasa untuk disebarakan ke masyarakat?
2. Bagaimana komunikasi partisipatif aparat kelurahan dalam menjalankan Program Makassar' tidak rantasa?

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa Kelurahan di Kota Makassar yaitu Kelurahan Pa'baeng-baeng Kecamatan Tamalate dimana wilayahnya terdapat pasar dan kanal, Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini dimana wilayahnya terdapat pasar dan perumahan, Kelurahan Paccerrakkang Kecamatan Biringkanayya, Kelurahan Wajo Baru dan Kelurahan Tompobalang Kecamatan Bontoala dimana Kelurahanannya terdapat pasar, kanal dan komplek pertokoan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan dan melakukan studi pada situasi alami (Creswell, 1994). Jenis penelitian ini mengacu pada pandangan yang menyatakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku dari orang-orang yang diamati, Bogdan dan Taylor dalam Ardial (2014).

HASIL

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari peneli *Penjabaran Program Kebersihan Lingkungan Makassar' Tidak Rantasa Kepada Masyarakat.*

Aparat kelurahan sebagai layanan terdepan kepada masyarakat pada pemerintah kota, perlu menguasai program yang dicanangkan oleh pemerintah kota. Pengetahuan tentang program itu sendiri dan kemampuan mengajak warganya untuk menjalankan program tersebut sangat penting dikuasai oleh aparat kelurahan.

Program kebersihan lingkungan Makassar'Tidak Rantasa yang di canangkan oleh pemerintah kota Makassar adalah program yang harus disampaikan kepada warga melalui pihak kelurahan. Disisi lain dari pemahaman aparat kelurahan tentang perogram tersebut perlu dikuasai agar aparat kelurahan dapat menjelaskan apa tujuan dari program kebersihan lingkungan Makassar Tidak Rantasa.

Program yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Makassar, langsung disampaikan ke seluruh SKPD yang ada di kota makassar untuk dijalankan, namun penyampaian program ini tidak disertai dengan dokumen tata cara pelaksanaan program, yang diterima oleh SKPD khususnya kelurahan hanyalah garis besar mengenai program tersebut.

Jumlah aparat kelurahan juga memegang peranan penting dalam menjalankan program ini, dari kelima kelurahan yang peneliti datangi sebagian besar merasa tenaga kelurahan yang tersedia saat ini sangat kurang, namun ada juga yang merasa dengan jumlah tenaga kerja yang ada dikelurahan saat ini dirasa cukup. Seperti yang di kemukakan oleh lurah Wajo Baru sebagai berikut:

"Jumlah pegawai yang ada dikelurahan kami Cuma 7 orang, dan saya rasa sangat tidak mencukupi"

Jumlah pegawai yang ada di kelurahan idealnya terdiri dari 15 orang dan sebaiknya sebagian besar terdiri dari laki laki. Demikian yang dikemukakan oleh lurah Tompobalang sebagai berikut:

"Kalau termasuk dengan tenaga kontrak ada 7 pegawai dan saya rasa belum

mencukupi, apalagi rata-rata pegawai saya perempuan"

Senada dengan yang dikemukakan oleh lurah tompoballang, lurah Tidung juga mengatakan sebagai berikut

"5 organik (Pegawai Negeri Sipil) dan kontrak 10 orang dan saya rasa cukup dengan beban kerja namun apabila ingin ditambah sebaiknya posisi yang kosong di isi oleh laki-laki"

Dibutuhkannya tenaga laki-laki menurut mereka karena sebagian besar tugas dari pihak aparat kelurahan membutuhkan tenaga yang extra yang tidak sebanding yang dilakukan oleh pihak perempuan. Lain hal nya yang dikemukakan oleh lurah Pacerakkang

"Jumlah pegawai dikelurahan saya ada 13 pegawai, saya rasa tidak ada hubungannya jumlah tenaga kerja dengan kecukupan beban kerja. Yang penting dengan 13 orang tersebut mau semua ji bekerja. Kalaupun ada penambahan nanti saya harap tenaga kerja kebersihan bukan yang di administrasi, karena sebagian besar kerja dikelurahan adalah kerjanya outdoor"

Dari yang dikemukakan oleh lurah Pacerakkang jumlah tenaga kerja 13 orang sudah mencukupi yang penting ke 13 orang tersebut mau bekerja sesuai dengan yang diinstruksikan oleh pimpinan, tidak masalah walaupun laki-laki atau perempuan yang penting mereka mau bekerja. Adapun kalau ada penambahan yang dibutuhkan oleh kelurahan adalah tenaga kebersihan dimana hal ini disebabkan sebagian besar kegiatan kelurahan yang dilakukan adalah outdoor

Dari kelima kelurahan yang dipilih oleh peneliti jumlah pegawai yang paling sedikit terdapat di kelurahan Wajo Baru yaitu sebanyak 6 orang, dikelurahan ini pula terdapat kekurangan pegawai organik yaitu sekretaris lurah dan kepala seksi kebersihan sementara di kelurahan Tidung kepala seksi pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum dan kepala seksi pengelolaan

kebersihan yang kosong, sedangkan kelurahan lainnya lengkap.

Dalam menjalankan program kebersihan lingkungan Makassar tidak rantasa, walikota sudah mempunyai program – program yang berkaitan dengan hal tersebut. Seperti yang di kemukakan oleh Orang Dekat walikota sebagai berikut

“Makassarta tidak rantasa di wujudkan dalam program program yang dijalankan oleh aparat, contohnya program terkait dengan kebersihan tentang bagaimana sistem pengangkutan yang dilakukan dinas. Jadi program-program yang berkaitan dengan Makassar tidak rantasa sudah ada dan dinas-dinas mengelola program tersebut dengan kreativitas masing masing”

Para lurah mendapatkan program Kebersihan Lingkungan Makassar tidak rantasa pertama kali di dapatkan pada saat program ini di luncurkan di Acara Abulo Sibatang di Celebes Convention Center di Tanjung bunga dimana seluruh SKPD di hadirkan untuk menerima program ini.

Hal ini sesuai dengan Lurah Wajo Baru yang mengatakan sebagai berikut

“ Pada saat program ini diluncurkan di Tripel C di tanjung bunga kami dikumpulkan disana untuk menerima program tersebut untuk dijalankan di kelurahan kami”.

Lain halnya yang disampaikan oleh Lurah Paccerrakkang yang mengatakan sebagai berikut

“Saya baru dilantik tiga bulan yang lalu, jadi ketika saya menjabat saya sudah mengetahui sebeulunya program ini ketika saya masi staf dinas ketenaga kerjaan kota Makassar”.

Senada dengan lurah Wajo Baru mengatakan bahwa pertama kali kelurahan menerima program Makassar; tidak rantasa sebagai berikut

“Saya mendapatkan program ini pada saat 5 juni 2014 pada saat diluncurkan di tanjung bunga”

Pada waktu program Makassar tidak rantasa dikonsep ada beberapa formula

tentang bagaimana pengelolaan sampah yang perlu dilakukan oleh pemerintah kota Makassar hal tersebut di kemukakan oleh Orang Dekat walikota sebagai berikut

“Pertama yaitu bagaimana menegakkan aturan dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk merubah perilakunya dalam menangani sampah. Kedua yaitu bagaimana mengelola sikap masyarakat itu berubah. Ketiga yaitu bagaimana mendidik masyarakat dalam pengelolaan sampah itu sendiri yang terdiri memilah sampah antara organik dan nonorganik. Keempat yaitu mencoba pendekatan budaya dalam pengelolaan sampah contohnya sampah tukar beras dimana kajian sosiologi masyarakat perkotaan Makassar beras adalah pangan tertinggi yang dihormati oleh sukubugis Makassar, Kelima yaitu pendekatan LISA yang khususnya ditujukan kepada anak kecil ketika anak kecil sadar akan sampah otomatis orang dewasa akan merasa malu dan dan mengikuti”

Tidak adanya konteks yang baku dalam menjelaskan apa itu program Makassar tidak rantasa membuat peneliti membuat pertanyaan kepada informan sejauh mana pemahaman informan sebagai aparat kelurahan tentang program kebersihan Makassar tidak rantasa ini.

Dalam wawancara informan peneliti yaitu lurah Wajo Baru tentang pemahamannya tentang program Makassar’ Tidak Rantasa sebagai berikut :

“Makassarta tidak rantasa bukan hanya mungut sampah masalah kebersihan, namun bagaimana kita sebagai pegawai ini dapat melayani masyarakat dikelurahan sebagai ujung tombak dalam pelayanan masyarakat”

Selanjutnya pemahaman akan program kebersihan Makassar tidak rantasa serupa dengan hasil wawancara lurah yang lain seperti lurah Tidung sebagai berikut:

“Makassarta tidak rantasa adalah cara membersihkan lingkungan sekitar dan

melakukan pelayanan di kelurahan dengan bersih”

Peneilti mencoba mencari jawaban lain dari pemahaman aparat tentang Program kebersihan Makassar tidak rantasa namun diliat dari makna jawaban yang diberikan oleh informan hasilnya tidak jauh beda dengan informan yang lain. Menurut Lurah Tompobalang Program Makassar tidak Rantasa adalah

“Makassarta tidak rantasa artinya bukan berarti cuman kebersihan saja mulai dari pelayanan dan segala macam itulah pengertiannya artinya bagaimana itu Makassar supaya ramah kan ramah itu juga tidak rantasajuga itu namanya semua mulai dari kebersihan dan pelayanan makanya timbul itu Makassar sombere itu bagian dari Makassar tidak rantasa “

Hampir sama dengan hasil wawancara dengan wawancara lurah Paccerakkang yang dikemukakan sebagai berikut

“Makassarta tidak rantasa menurut saya adalah sifatnya global maksudnya menyeluruh terhadap banyak aspek kehidupan, bukan hanya terbatas dalam hal kebersihan, hal-hal besar itu harus dimulai dari yang kecil kita tidak bisa melakukan apa-apa kalau lingkungan kita kotor”

Dari jawaban wawancara yang dipilih secara purposif diatas, di temukan meskipun tidak ada konteks yang baku tentang program Makassar tidak rantasa, para informan dapat mengartikan program ini sesuai dengan pemahaman mereka tentang rantasa itu sendiri dan hasilnya pemahaman mereka sama satu dengan yang lain.

Dalam Hal kebersihan penjelasan yang diberikan oleh para informan tentang Program Makassar Tidak Rantasa hampir senada, seperti yang di ungkapkan lurah Paccerakkang Sebagai berikut

“Makassar tidak rantasa mempunyai beberapa item item kebersihan antara lain Merawat tempat sampah Gendang 2 ,LORONG GARDEN, dan menurut pendapat

saya kami di kelurahan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, bagaimana merubah pandangan masyarakat tentang sampah”

Hal senada di ungkapkan oleh lurah pa' baeng-baeng sebagai berikut

“Makassar tidak rantasa mempunyai beberapa item item kebersihan antara lain MABELLO,LORONG GARDEN, dan menurut pendapat saya program ini adalah lanjutan dari program kebersihan yang pernah jalan sebelumnya di kelurahan saya.

Dari hasil wawancara, kesemua informan menjawab pengertian program ini dari segi kebersihan lingkungan hampir mirip.

Adapun cara menjabarkan program Makassar tidak rantasa ini kepada masyarakat sesuai dengan hasil wawancara lurah Tompobalang sebagai berikut

“Dengan mengedarkan surat edaran yang disebar ke warga.dan juga kunjungan dari rumah ke rumah. Kunjungan dari rumah ke rumah adalah sangat penting karena kita bertemu langsung dengan warga secara tatap muka”

Senada dengan cara menjabarkan kepada masyarakat lurah Tidung mengatakan sebagai berikut

“Dengan cara memberikan surat edaran yang dibagikan ke seluruh RT dan RW di wilayah saya. Selain itu saya menghias daerah yang rawan bertumpuk sampah dengan meletakkan pot bunga dan mencetak nomor telepon saya di pot tersebut agar warga dapat menghubungi saya untuk informasi tentang jadwal pembuangan sampah”

Jawaban lain yang deperoleh peneliti dari lurah Paccerakkang sebagai berikut

“Kami informasikan kepada masyarakat tentang program ini dengan turun langsung kemasyarakat secara tatap muka.Kami juga membuat poster dan imbauan tentang menjaga kebersihan”

Pihak kelurahan menggunakan teknik penjabaran program Makassar tidak rantasa

kepada masyarakat menggunakan media persuratan berupa surat edaran dan melalui tatap muka kepada masyarakatnya. Hal ini diklaim oleh pihak aparat kelurahan efektif dalam penyebaran informasi tentang program pemerintah yang akan atau sedang dijalankan dalam hal ini program kebersihan lingkungan Makassar tidak rantasa.

Peneliti berusaha menggali lebih dalam tentang bagaimana penjabaran program kebersihan Makassar tidak rantasa ini di sampaikan ke masyarakat. Dengan alasan itu peneliti menanyakan bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kelurahan kepada warganya.

Dalam jawaban dari lurah Tompobalang sebagai berikut

“Sosialisasi yang kami lakukan dalam bentuk pertemuan atara RT dan RW,dengan mengunjungi dari rumah ke rumah”

Sedangkan jawaban dari lurah Wajo Baru sebagai berikut

“Sosialisasi yang kami lakukan dalam bentuk pertemuan atara RT dan RW,selain itu mengadakan bimbingan teknis masalah pengelolaan sampah kepada pemuda dan karang taruna di kelurahan saya” (hasil wawancara dengan Lurah Wajo Baru 18 mei 2015)

Selain itu lurah Tidung memberikan jawaban seperti berikut

“Sosialisasi yang kami lakukan dalam bentuk penyebaran surat edaran, mengumumkan ke masyarakat melalui pengeras suara mesjid dan tatap muka dengan warga” (hasil wawancara Lurah Tidung 18 mei 2015)

Pola penjabaran yang dilakukan di kelurahan masi menggunakan pola lama yaitu pertemuan dengan pihak RT dan RW beserta tokoh masyarakat untuk menjelaskan tujuan dari program kebersihan lingkungan Makassar' tidak rantasa.

Pihak kelurahan juga memanfaatkan fasilitas publik yang ada yaitu dengan menggunakan pengeras suara dimesjid untuk menyebarkan program kebersihan selain itu pada waktu

tertentu seperti sehabis shalat jumat dimana sebagian besar masyarakat berkumpul dimesid dilakukan pengumuman berupa imbauan untuk membersihkan lingkungan sekitar.

Komunikasi Partispatif Aparat kelurahan Dalam Menjalankan Program Kebersihan Makassar' Tidak Rantasa

Dalam proses komunikasi tentang program kebersihan lingkungan Makassar' tidak rantasa di kelurahan dibutuhkan keahlian berkomunikasi aparat untuk menyebarkan program itu ke masyarakat.Seperti yang dibahas sebelumnya program Makassar tidak rantasa disampaikan pemerintah kota Makassar kepada seluruh SKPD yang berada di kota Makassar termasuk Aparat kelurahan yang dilakukan di Celebes Convention Center pada bulan juni 2014.

Para aparat kelurahan yang peneliti temui, kesemuanya baru dilantik di bulan maret 2015, pada saat mereka dilantik di lapangan karebosi, ada pakta integritas yang ditanda tangani oleh mereka untuk dijalankan selama mereka menjabat di kelurahan.

Peneliti mencoba melakukan pertanyaan terkait tentang pakta integritas yang ditandatangani sebelum dilantik, dan hubungannya tentang penjalanan program Makassar tidak rantasa di wilayah masingmasing.pertanyaan tersebut berupa adakah Punishment and Reward yang didapatkan oleh aparta kelurahan apa bila menjalankan program tersebut.

Lurah Paccerrakkang menjelaskan sebagai berikut :

“Begini ketika kami menjabat jabatan ini memalui sistem lelang jabatan, kami sebagai lurah di nilai berupa berbasis kinerja, dan menurut kabar hasil kinerja ini akan keluar di bulan agustus nanti. Kalau tentang hukuman saya tidak ketahui bentuknya bagaimana”

Hal senada yang dijelaskan oleh lurah Wajo Baru sebagai berikut

“Saya tidak tahu dengan hukuman dan penghargaan namun kinerja kami akan dinilai setiap tiga bulan”

Demikian pula Lurah Pa’Baeng-baeng menjelaskan sebagai berikut

“Kalau hal tersebut saya tidak tahu ya, yang jelas kami akan dinilai setiap 3 bulan sejak jabatan kami pegang”

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada sejumlah lurah, didapatkan bahwa mereka tahu pasti ada Punishment and Reward yang mereka dapatkan apabila menjalankan program-program yang direncanakan oleh pemerintah kota Makassar, namun mereka tidak mengetahui bentuk Punishment and Reward apa yang mereka terima. Satu hal yang pasti mereka tahu bahwa jabatan yang mereka dapatkan melalui sistem lelang akan di nilai berbasis kinerja yang dilakukan per tiga bulan.

Walikota terpilih Dany pomanto mengatakan kepada media bahwa target kepada seluruh lurah yang baru untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat selama kurun waktu tiga bulan.

“Kalau SKPD sembilan bulan, kalau lurah terhitung hanya tiga bulan saja dan terhitung pada hari ini (pasca pelantikan). Lurah harus bekerja baik, itu ukurannya. Kalau tidak baik, kita copot, Saya akan menurunkan tim sebanyak 143 orang ke kelurahan masing-masing untuk memantau kinerja lurah. Kalau bisa, masyarakat komplain langsung ke saya,”

Jadi bisa dipastikan bahwa Punishment yang diterima oleh lurah yang tidak menjalankan kewajibannya pada saat menjabat adalah pencopotan jabatan.

Dalam hal ini bentuk komunikasi partisipatif yang dilakukan aparat kelurahan dalam menjalankan program Makassar’ tidak rantasa dapat dilihat dari bentuk penyajian

informasi dari program kebersihan Makassar tidak rantasa untuk disampaikan kepada masyarakat didapat dari hasil wawancara sebagai berikut

“Dengan mengedarkan surat edaran yang disebar ke warga dan juga kunjungan dari rumah ke rumah. Kunjungan dari rumah ke rumah adalah sangat penting karena kita bertemu langsung dengan warga secara tatap muka” (hasil wawancara dari lurah Tompobalang 14 juni 2015)

Peneliti mencoba mencari bentuk penyajian informasi lain yang dilakukan oleh aparat kelurahan dalam menyebarkan informasi tentang program Kebersihan Lingkungan Makassar’ tidak rantasa namun Senada dengan jawaban yang diberikan oleh lurah Tompobalang, lurah Tidung memberikan jawaban sebagai berikut

“Dengan cara memberikan surat edaran yang dibagikan ke seluruh RT dan RW di wilayah saya. Selain itu saya menghias daerah yang rawan bertumpuk sampah dengan meletakkan pot bunga dan mencetak nomor telepon saya di pot tersebut agar warga dapat menghubungi saya untuk informasi tentang jadwal pembuangan sampah.

Surat edaran yang disebar oleh aparat kelurahan adalah hal yang lazim dilakukan oleh pihak aparat dalam menyebarkan informasi tentang program kebersihan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu tatap muka dinilai efektif dalam menyebarkan informasi program kebersihan karena aparat bertemu langsung dengan warga sehingga aparat dapat membangun komunikasi dengan warganya secara baik.

Dari jawaban lurah Tidung yang menggunakan media pot bunga yang di pasang nomor telepon lurah itu sendiri agar masyarakat dapat memperoleh informasi apa saja tentang kelurahan, jadi tidak hanya masalah kebersihan saja dan hal ini langsung dijawab oleh lurah itu sendiri.

Selain bentuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat, dibutuhkan pula strategi-strategi ataupun kiat-kiat yang dilakukan oleh aparat agar program kebersihan Makassar tidak rantasa bisa dilakukan oleh warganya. Dalam program ini aparat kelurahan memikirkan bagaimana sampah yang ada diwilayah kelurahannya bisa terkelola dengan baik sehingga kata rantasa sebisa mungkin tidak melekat di wilayah masing-masing. Adapun wilayah yang berpotensi melekat kata rantasa menurut jawaban informan sebagai berikut

“Kalau dalam wilayah saya, disini kebetulan Tompobalang ada pasar, maka dari itu pasar lah yang berpotensi. Jadi jadwal pembuangan sampah jam 8 malam otomatis sampah para pedagang bertumpuk karena para pedagang sudah pulang jam 6 sore”

Dari hasil wawancara diatas pasar adalah wilayah yang berpotensi melekat kata rantasa dikarenakan pasar tempat berkumpulnya masyarakat untuk bertransaksi jual beli, potensi timbulnya sampah juga lebih besar seiring banyaknya orang yang ada dipasar.

Masing masing wilayah dari kelurahan yang peneliti pilih mempunyai wilayah merah yang berpotensi melekat kata rantasa.hal ini sesuai dengan parameter wilayah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu wilayah kelurahan yang memiliki perumahan, ruko, pasar, dan Kanal.Berikut jawaban informan yang lain

“Kalau dalam wilayah saya, yaitu sekitar 2 pasar yang ada di wilayah saya dan jalanan di depan ruko ruko.”

Lurah pa’baeng-baeng mengatakan jalan dan ruko adalah berpotensi melekat kata rantasa menurut beliau jalanan dipakai oleh masyarakat untuk tempat beraktifitas,sehingga potensi timbulnya sampah sangat besar seiring tingginya pengguna jalan yang melewati jalanan tersebut,ditambah dengan rendahnya kesadaran masyarakat pengguna jalan untuk tidak membuang sampah dijalan.

Jawaban lain didapatkan dari informan berikut

“Kalau dalam wilayah saya, disekitar kontainer sampah yang berada di GORO dikarenakan banyak warga bermotor yang singnggah buang sampah di kontainer GORO, baik kalau sampahnya masuk ke kontainer, tapi rata-rata diluar kontainer dan sebagian pasar di depan perumahan bulog”

Lain halnya dengan lurah Tidung, beliau mengatakan daerah yang berpotensi melekat kata rantasa diwilayahnya adalah didekat kontainer tempat pembuangan sampah sementara, hal ini disebabkan masih banyak pengguna kontainer sampah membuang sampahnya tidak dalam kontainer melainkan di pinggir kontainer apalagi pengguna jalan yang lewat disamping kontainer kadang kala membawa bungkusan sampah dan melemparkannya kearah kontainer,masih bagus kalau bungkusan sampah itu masuk kedalam kontainer akan tetapi kalau tidak maka yang ada sampah itu jatuh di sekitar kontainer sampah dan kata rantasa dapat melekat di daerah tersebut.

Lain halnya yang dikemukakan oleh lurah Paccerakkang tentang wilayah yang berpotensi dengan kata rantasa sebagai berikut

“Hampir 70 persen dari Wilayah saya bisa di katakan Rantasa”

Wilayah kelurahan Paccerakkang, umumnya berupa tanah kosong dan rawa, tidak mengherankan lurah Paccerakkang mengatakan 70 % wilayahnya berpotensi dengan kata rantasa. Didukung dengan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah ditambah lagi dengan kurangnya saranda dan prasarana untuk pengelolaan sampah.

Dari 4 parameter yang ditentukan oleh peneliti, dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan salah satu parameter yaitu pasar yang menurut peneliti berpotensi melekat kata rantasa ternyata pihak kelurahan tidak mempunyai wewenang untuk mengurus hal

kebersihan, dikarenakan pasar mempunyai wewenang sendiri dalam mengurus masalah persampahan dan kebersihan pasar. namun daerah yang berada diluar lingkungan pasar masih dalam wewenang pihak kelurahan. dengan saling berkoodinasi antara pihak kelurahan dan pihak pasar, kedua belah pihak saling membantu dalam membersihkan baik itu dalam lingkungan pasar maupun disekitar pasar.

Adapun bentuk koordinasi antara pihak kelurahan dengan SKPD lain dalam menjalankan Program Kebersihan lingkungan Makassar tidak rantasa didapatkan jawaban sebagai berikut

“Wilayah saya adalah binaan Dinas Pekerjaan Umum, maka setiap minggu di hari jumat kami berkoordinasi untuk membersihkan lingkungan di kelurahan saya”

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Makassar ta' Tidak Rantasa (GEMAR MTR) Kota Makassar. Didalamnya berisi pembagian wilayah binaan kepada masing masing SKPD/ Unit kerja dan Direksi Perusda dalam Program Gerakan Masyarakat Makassar ta' Tidak rantasa (GEMAR MTR).

Berdasarkan dari jawaban lurah dari Wajo Baru, bahwa kelurahan Wajo Baru masuk dalam binaan Dinas Pekerjaan umum Kota Makassar. sedangkan bentuk koordinasi yang dilakukan antara Dinas Pekerjaan umum dan Kelurahan berupa kerja bakti membersihkan lingkungan kelurahan yang dilakukan bersama-sama setiap minggu.

Tidak hanya berkoodinasi dengan SKPD yang mempunyai binaan di kelurahan tersebut. Koordinasi dengan tingkat atas kelurahan yaitu kecamatan pun perlu diperhatikan seperti yang di ungkapkan oleh lurah Tidung mengatakan sebagai berikut

“Pihak Kecamatan mengedarkan Surat

Edaran Ke kelurahan kelurahan untuk disampaikan kepada aparat kelurahan, dan kelurahan menyebarkan informasi tersebut melalui pertemuan dengan RT dan RW kelurahan dan media komunikasi yang dilakukan antara kelurahan dan kecamatan melalui HT (Handy Talky) dan aplikasi Whatsapp yang ada dismartphone”

Dari pernyataan diatas Pihak Kecamatan yang membawahi kelurahan selalu melukan komunikasi dengan pihak kelurahan apabila ada program pemerintah yang hendak disampaikan kepada kelurahan dan kelurahan yang menruskan kepada masyarakat.

Pihak kelurahan akan merespon setiap program yang turun dari pemerintah melalui kecamatan. Bentuk responnya pun beragam disesuaikan dengan isi surat edaran yang dikirimkan oleh kecamatan hal ini senada yang diungkapkan oleh M.Syamsul G Kepala seksi Kebersihan Kelurahan pabaeng-baeng

“Ketika kami mendapatkan petunjuk dari dari pemerintah kekecamatan kecamatan ke kelurahan maka kami langsung bentuk sesuai dari petunjuk yang turun”

Dari pandangan Informan tentang pelaksanaan program kebersihan lingkungan Makassar ta' tidak rantasa bahwa program ini merupakan program dari pemerintah untuk dijalankan ke kelurahan. Peneliti berasumsi bahwa para informan sebagai aparat kelurahan menyadari betul pentingnya peran serta mereka untuk memahami program ini agar bisa mereka jalankan dan jelaskan kepada warganya.

Jalannya program Makassar ta' tidak rantasa tergantung pada kephahaman aparat tentang program tersebut dan kemampuan para aparat dalam menyebarkan program tersebut kepada warganya. Strategi yang diakukan para aparat kelurahan dalam menyebarkan program kebersihan lingkungan Makassar ta' tidak rantasa kepada masyarakat sangat diperlukan dan hal tersebut membutuhkan kreativitas para aparat kelurahan dalam menyebarkan

informasi program tersebut kepada warganya. Adapun komunikasi partisipatif Aparat kelurahan dengan SKPD lain dilakukan secara Downward Communication yang artinya kelurahan menunggu program yang dikeluarkan oleh SKPD berkaitan tentang Makassar Tidak Rantasa di wilayah binaan SKPD terkait sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 660.2/1087/Kep/V/2014 tentang Pembagian Wilayah binaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksanaan Program Gerakan Masyarakat Makassar ta' Tidak Rantasa (GEMAR MTR) Kota Makassar tanpa bisa ikut berperan serta dalam penyusunan program yang berkaitan dengan Kbersihan Lingkungan Makassar' Tidak Rantasa yang akan jalan di wilayahnya.

PEMBAHASAN

Cara Aparat KelurahanMenjabarkan Program Kebersihan Lingkungan Makassar Tidak Rantasa Kepada masyarakat.

Pemahaman aparat Kelurahan tentang program Makassar Tidak rantasa sangat penting dalam menjalankan program ini ke masyarakat. Ketika suatu program datang dari pemerintah aparat kelurahan perlu memahami isi dan tujuan program tersebut agar dapat menjabarkannya ke masyarakat. Dalam menjabarkan program ini, Aparat kelurahan perlu mempunyai pengetahuan tentang bagaimana program ini seharusnya berjalan sehingga dalam menyebarkan informasi tentang program ini dapat dilakukan dengan benar. Selain itu dibutuhkan keahlian berkomunikasi dalam menyampaikan program ini kemasyarakat. Model ini adalah model komunikasi transaksional. Model komunikasi transaksional berarti bahwa proses komunikasi tersebut kooperatif, baik pengirim maupun penerima sama-sama bertanggung jawab terhadap dampak dan

efektivitas komunikasi yang terjadi.

Pada Model ini menuntut kita untuk menyadari pengaruh satu pesan terhadap pesan yang lain dimana satu pesan dibangun dari pesan yang ada sebelumnya. Hal ini menyebabkan adanya saling ketergantungan antara masing masing komponen komunikasi. Perubahan komponen komunikasi otomatis akan mengubah komponen yang lainnya. Jadi model ini berasumsi bahwa kita secara terus menerus mengirim dan menerima pesa,kita juga berurusan dengan elemen verbal dan non verbal dengan kata lain komunikator menegoisasikan makna.

Dari hasil wawancara yang telah dijabarkan sebelumnya para aparat kelurahan dalam memaknai arti dari program tersebut ditemukan bahwa makna dari kata Rantasa mempunyai kontruksi interpretif yang sama dengan aparat lainnya. Kata rantasa di maknai dengan jorok, tidak teratur,tidak rapi. Terbentuk suatu makna didalam pikiran masing masing aparta kelurahan tetang Rantasa melalui interkasi sosial sehari hari.

Dalam hal ini Program Makassar tidak rantasa adalah simbol yang dimaknai oleh aparat kelurahan untuk menentukan bagaimana menguasai program Makassar tidak rantasa sehingga dapat menjabarkan program tersebut kepada mayarakat.

Jadi aparat kelurahan dalam menjabarkan program kebersihan Makassar' tidak rantasa ini kemasyarakat, aparat tersebut harus terlibat dalam suatu peristiwa komunikasi kemasyarakat, dan untuk menjelaskan program ini dengan menggunakan elemen verbal ataupun nonverbal yang bisa dimengerti secara luas oleh masyarakat agar proses penyebaran informasi tentang program ini dapat lebih cepat dan mudah untuk dipahami.

Dalam Model S-M-C-R khusus dalam istilah C atau Channel yang berarti saluran atau Media, dari komponen tersebut menurut Edward Sappir mengandung dua pengertian yaitu primer sebagai lambang yang berarti

lambang-lambang yang digunakan khusus dalam komunikasi tatap muka (Face-to-face) Communication., yang kedua sekunder yaitu media yang berwujud baik media massa, maupun media nir-massa.

Dari hasil wawancara para aparat menggunakan surat edaran dan surat imbauan ke masyarakat dalam menjabarkan program Makassar tidak rantasa hal demikian adalah channel primer dari Model S-M-C-R selain itu metode door to door dan menggunakan fasilitas umum seperti pengeras suara yang ada didalam rumah ibadah yang dilakukan oleh aparat kelurahan adalah channel sekunder dari Model S-M-C-R. selain itu menurut sean Mc Bride dalam Cangara (2012), komunikasi tidak bisa diartikan sebagai pertukaran berita dan pesan tetapi juga sebagai kegiatan individu dan kelompok mengenai pertukaran data, fakta dan ide.

Komunikasi mempunyai berbagai macam komponen didalamnya terkadang terdapat memiliki istilah yang berbeda, sama dengan menggunakan istilah informasi and pesan untuk menyatakan komponen pesan yang dikirimkan dan begitu pula ada yang menggunakan istilah sender dan source untuk menyatakan orang yang mengirimkan pesan begitu banyak istilah yang digunakan secara luas tentang elemen yang terdapat dalam Komunikasi. namun berikut ini beberapa komponen komunikasi secara ringkas:

a. Pengirim pesan

Yaitu orang atau individu yang mengirim pesan. Pesan atau informasi yang dikirimkan berasal dari otak dari pengirim pesan.oleh karena itu sebagai pengirim pesan sang pengirim menciptakan pesan yaitu menentukan arti apa yang akan dikirimkan kemudian menyandikan/encode pesan tersebut kedalam satu pesan.setelah itu dikirim melalui saluran

Pesan yang berupa program Makassar tidak rantasa dibentuk oleh pemerintah kota Makassar yang berasal dari walikota terpilih

Dany Pomanto, pesan ato program yang dibuat tersebut untuk menciptakan bagaimana warga kota Makassar dapat mengelola sampahnya dengan baik.

b. Pesan

Yaitu informasi yang dikirimkan kepada penerima.pesan dapat berupa verbal maupun nonverbal.pesan secara verbal dapat secara tertulis berupa bukiu,majalah,memo dan lain lain, pesan yang berupa lisan dapat berupa percakapan tatap muka,melalui radio,telpon, dan video call.sedangkan pesan nonverbal dapat berupa isyarat,gerak tubuh,ekspresi muka,dan nada suara.

Informasi yang dikirimkan oleh pemerintah berupa isi dari program Makassar tidak rantasa yang dilakukan secara verbal kepada seluruh SKDP di kota Makassar.

c.Saluran

Yaitu jalan agar pesan itu sampai kepada penerima.channel yang biasa dalam komunikasi adalah gelombang cahaya dan suara yang dapat kita lihat dan dengar.akan tetapi alat yang digunakan agar cahaya dan suara itu berpindah mungkin berbeda-beda.sebagai contoh orang yang melakukan pembicaraan tatap muka udara berfungsi sebagai saluran.lain halnya dengan surat yang dikirimkan melalui gelombang cahaya sebagai saluran kita dapat melihat huruf yang dicetak diatas kertas..kertas dan tulisan itu sendiri adalah alat untuk menyampaikan pesan.

Sedangkan dari hasil wawancara yang peneliiti lakukan, saluran yang digunakan untuk menyebarkan pesan ini kepada aparat kelurahan berupa surat edaran, poster, dan Surat Keputusan Walikota.

d. Penerima Pesan

Yaitu yang menganalisis dan menginterpretasikan isi pesan yang diterimanya.

Dilihat dari penelitian ini, penerima pesan program ini adalah Aparat kelurahan

bagaimana aparat kelurahan mengimpresmentasikan program kebersihan Makassar Tidak rantasa, cara kerja, pemahaman dan selanjutnya di sebarakan ke masyarakat.

e.Balikan

Yaitu respon yang diterima dan dikirimkan kepada pengirim pesan.dengan diberikan reaksi ini kepada si pengirim,pengirim dapat mengetahui apakah pesan yang dikirimkan tersebut diinterpretasian sama dengan apa yang dimaksudkan oleh si pengirim dan bila arti pesan yang dimaksudkan oleh pengirim diinterpretasikan sama dengan penerima maka komunikasi tersebut dapat dikatakan komunikasi yang efektif.

Disini balikan atas program Makassar tidak rantasa oleh aparat kelurahan berupa penjalan program tersebut yang dilakukan oleh aparat kelurahan yang selanjutnya disebarkan kepada masyarakat.

Dari hasil wawancara sebelumnya didapatkan bahwa penjabaran program yang dilakukan oleh aparat kelurahan kepada masyarakat berupa susialisasi yaitu menyediakan dan mengajarkan ilmu pengetahuan bagaimana maksud dan tujuan dari program Makassar' tidak rantasa sehingga masyarakat menyadari pentingnya kebersihan lingkungan didaerah masing-masing.

Program Makassar tidak rantasa adalah program baru yang dibawa oleh walikota Makassar periode 2014-2019 dani pomato, dalam hal tentang pengolaan sampah program ini membuat formula dalam pengelolaan sampah yang benar dikota Makassar.dari hasil wawancara sebelumnya dengan informasi kunci terdapat 5 formula yang dikemukakan tentang pengelolaan sampah yang benar menurut program Makassar tidak rantasa yaitu :

1).Bagaimana menegakkan aturan dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk merubah perilakunya

dalam menangani sampah.

2).Bagaimana mengelola sikap masyarakat itu berubah.

3).Bagaimana mendidik masyarakat dalam pengelolaan sampah itu sendiri yang terdiri memilah sampah antara organik dan nonorganik.

4).Mencoba pendekatan budaya dalam pengelolaan sampah contohnya sampah tukar beras dimana kajian sosiologi masyarakat perkotaan Makassar beras adalah pangan tertinggi yang dihormati oleh suku bugis Makassar maka dari itu jika program Sampah ditukar beras jalan, sampah itu sama halnya dengan beras dimana suku bugis Makassar manganggap dengan membuang sampah sembarangan sama saja dengan membuang beras sembarangan yang mana menurut masyarakat bugis-Makassar hal tersebut adalah pamali.

5).Pendekatan LISA yang khususnya ditujukan kepada anak kecil ketika anak kecil sadar akan sampah otomatis orang dewasa akan merasa malu dan dan mengikuti.

Menurut teori Difusi inovasi yang dikemukakan Rogers (1983), mendefinisikan difusi sebagai proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial (*the process by which an innovation is communicated through certain channels overtime among the members of a social system*). Disamping itu, difusi juga dapat dianggap sebagai suatu jenis perubahan sosial yaitu suatu proses perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi sistem sosial.

Inovasi adalah suatu gagasan, praktek, atau benda yang dianggap / dirasa baru oleh individu atau kelompok masyarakat. Ungkapan dianggap / dirasa baru terhadap suatu ide, praktek atau benda oleh sebagian orang, belum tentu juga pada sebagian yang lain. Kesemuanya tergantung apa yang dirasakan oleh individu atau kelompok terhadap ide, praktek atau benda tersebut.

Kelima formula tersebut sesuai pada teori difusi inovasi dimana kelima formula tersebut adalah hal / ide yang baru tentang bagaimana pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya agar sampah tersebut tidak menumpuk dan hal ini perlu dijalankan oleh aparat pemerintah kota Makassar untuk disebarluaskan kepada masyarakat.

2. Komunikasi Partisipatif Aparat Kelurahan Dalam menjalankan Program Makassar Tidak Rantasa.

Dalam menjalankan program yang ada, aparat memerlukan keahlian dalam berkomunikasi agar bisa memahami maksud dan tujuan dari program tersebut. Aparat kelurahan perlu memahami elemen kognitif komunikasi (elemen komunikasi yang mempunyai sasaran pada perubahan pola pikir atau ideologi) pada program Makassar' tidak rantasa agar bisa dijalankan di wilayahnya.

Proses komunikasi pada intinya terbagi menjadi dua tahap, yakni secara primer dan secara sekunder (Effendy, 2003).

a). Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pesan dan atau perasaan kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Lambang atau simbol berupa bahasa, kiasan, syarat, gambar, warna dan lain sebagainya, yang secara langsung mampu "menerjemahkan" pikiran, perasaan komunikator kepada komunikan. Bahasa yang paling banyak digunakan dalam komunikasi adalah jelas karena bahasalah yang paling mampu "menerjemahkan" pikiran seseorang kepada orang lain. Komunikasi berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan yang diterima oleh komunikan. Dengan perkataan lain, komunikasi adalah proses membuat sebuah pesan setara (tuned) bagi komunikator dan komunikan.

b). Proses komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua, setelah memakai lambang sebagai media pertama. Seorang komunikator menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasarannya berada di tempat yang relatif jauh atau jumlahnya banyak. Surat, telepon, teleks, surat kabar, majalah, radio, televisi, film, dan banyak lagi adalah media kedua yang sering digunakan dalam komunikasi.

Dari hasil wawancara dari aparat kelurahan, penyajian informasi tentang program Makassar' tidak rantasa yang dilakukan oleh aparat kelurahan dalam mendukung jalannya program ini kemasyarakat dilakukan dengan cara yang klasik yaitu mengunjungi warga secara langsung (*door to door*) dan menjelaskan maksud dan tujuan program kebersihan lingkungan Makassar' tidak rantasa kepada warga secara langsung. Cara ini sesuai dengan imbauan walikota agar lurahnya mengunjungi 20 rumah per hari dalam mensosialisasikan program ini ke warganya. Selain itu pola penyebaran informasi tentang program kebersihan ini dilakukan pula dengan cara mengumpulkan tokoh masyarakat setempat dan memperkenalkan program ini kepada mereka sehingga tokoh masyarakat tersebut dapat menyebarkannya kembali ke masyarakat tempat ia tinggal.

Proses Komunikasi tersebut diatas masuk dalam proses komunikasi secara primer dimana Aparat kelurahan menjelaskan Program Ini kepada Masyarakat secara langsung dan menyapaikannya secara lisan. Dilihat dari proses komunikasi sekunder aparat kelurahan juga melakukan penyebaran informasi tentang Program Makassar' tidak rantasa kepada masyarakat menggunakan surat edaran dan surat imbauan sebagai media

penyampaian pesan kepada masyarakat. Selain itu media poster dan spanduk juga dilakukan oleh beberapa kelurahan. Hal ini dilakukan agar penyebaran informasi tentang program tersebut kemasyarakat dapat dilakukan dengan cepat.

Tujuh karakteristik partisipasi yang di kemukakan oleh Pretty J. (1995), yaitu :

1. Partisipasi pasif atau manipulatif.

Ini merupakan bentuk partisipasi yang paling lemah. Karakteristiknya adalah individu/masyarakat menerima pemberitahuan apa yang sedang dan telah terjadi. Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek/ pemerintah dan tidak memperhatikan tanggapan individu/ masyarakat sebagai sasaran program. Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran belaka.

2. Partisipasi informative

Di sini individu/masyarakat hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk proyek, namun tidak berkesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses keputusan. Akurasi hasil studi, tidak dibahas bersama masyarakat.

3. Partisipasi konsultatif

Individu/masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi, sedangkan orang luar mendengarkan, serta menganalisis masalah dan pemecahannya. Dalam pola ini belum ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Para profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.

4. Partisipasi insentif

Individu / masyarakat memberikan korbanan dan jasa untuk memperoleh imbalan insentif berupa upah, walau tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan.

Individu/masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan.

5. Partisipasi fungsional

Individu / masyarakat membentuk kelompok sebagai bagian proyek, setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati. Pada tahap awal, individu/masyarakat tergantung kepada pihak luar, tetapi secara bertahap kemudian menunjukkan kemandirian, menunjukkan kemandiriannya.

6. Partisipasi interaktif

Individu/masyarakat berperan dalam proses analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan, Pola ini cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Individu/masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.

7. Mandiri (*self mobilization*)

Individu/masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi pihak luar) untuk merubah sistem atau nilai-nilai yang mereka junjung. Mereka mengembangkan kontak dengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan dan dukungan teknis serta sumberdaya yang diperlukan. Yang terpenting, individu/masyarakat juga memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Partisipasi aparat kelurahan yang peneliti dapatkan dapatkan dari hasil wawancara Lurah yang bertindak sebagai pimpinan di kelurahan masuk dalam partisipasi insentif dalam artian aparat kelurahan dalam menjalankan program Makassar tidak rantasa memberikan pengorbanan dan merubah perilaku keseharian sebagai aparat

pemerintah.

Aparat pemerintahan yang tadinya jam kerjanya dari jam 7.30 sampai 15.30, akan tetapi ketika menjadi lurah jam kerjanya melebihi jam tersebut, kadang kala lurah sampai pulang jam 12 malam hanya untuk memastikan program tersebut jalan di wilayahnya.

Dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti, didapatkan bahwa meskipun tempat tinggal dari lurah tersebut jauh dari tempat kerjanya para lurah tersebut siap dihubungi 24 jam apabila ada hal yang penting dilaksanakan pada hari itu. Salah satu lurah yang peneliti wawancarai bahkan meninggalkan rumahnya dan tinggal dikantor. Lurah tersebut hanya pulang kerumahnya seminggu sekali .namun tidak semua kantor kelurahan menyediakan rumah istirahat untuk lurahnya.

Dari hasil wawancara lainnya ditemukan pula perilaku partisipasi konsultatif yang dilakukan oleh para sekretaris lurah dimana sekretaris lurah berkonsultasi terlebih dahulu kepada lurahnya apabila ingin melakukan hal tertentu terkait dalam pelaksanaan program kebersihan lingkungan Makassar' tidak rantasa, dan ada pula partisipasi pasif yang dilakukan oleh kepala seksi kelurahan yang mengatakan apapun petunjuk yang keluar dari itu adri kecamatan maupun lurah, kami akan laksanakan sesuai dengan bentuk petunjuk yang turun.

Proses perubahan sikap tampak bahwa sikap dapat berubah jika stimulus yang menerpa melebihi dari semula (Effendy 2003).

Pesan (stimulus) yaitu program Makassar' tidak rantasa dikeluarkan oleh pemerintah untuk dijalankan oleh pihak kelurahan dalam menyampaikan program ini pemerintah menggunakan media surat Keputusan walikota dan juga hasil wawancara Walikota Makassar oleh media surat kabar mengatakan bahwa lurah yang dilantik pada 6 Maret 2015 lalu harus meningkatkan kinerjanya dalam waktu 100 hari, jika tidak maka ada sangsi

yang akan dikenakan kepada mereka.

Komunikasi (organism) dalam hal ini adalah aparat kelurahan yang akan menerima program Makassar' tidak rantasa dan menjalankan program tersebut di kelurahannya., sedangkan Efek (Response) yang ditimbulkan aparat kelurahan berusaha sebaik mungkin dalam memahami dan melakukan strategi-strategi tertentu agar program Makassar' tidak rantasa dapat berjalan dengan baik di kelurahan masing-masing, hal ini mau tidak mau harus dilakukan mengingat adanya kutipan dari walikota apabila dalam kurun waktu 100 hari kinerja mereka tidak berkembang maka aparat kelurahan siap siap untuk mendapatkan sangsi.

Adapun bentuk sangsi yang dilakukan oleh walikota terhadap aparat kelurahan yang tidak melakukan program-program yang telah di berikan, dari hasil wawancara sebelumnya tentang ada tidaknya *Punishment and Reward* didapatkan bahwa tidak ada satupun lurah yang mengetahui bagaimana bentuk dari hal tersebut, yang jelas para lurah berkeyakinan apabila mereka berkinerja baik sesuai dengan harapan maka bisa dipastikan Reward akan mereka terima, begitupun sebaliknya apabila berkinerja buruk maka Punishment akan menanti.

Sedangkan dalam konsep komunikasi partisipasi dijelaskan dari bab sebelumnya berikut tentang arus komunikasi organisasi yaitu :

- a. Komunikasi dari atas kebawah (*Downward Communication*)

Arus informasi dari komunikasi ini mengalir dari para bawahan ke atasan, pada umumnya informasi tersebut berisi pesan yang berkenaan dengan tugas-tugas dan pemeliharaan.

- b. Komunikasi dari bawah ke atas (*Upward Communication*)

Informasi pada komunikasi ini berasal dari bawahan ditujukan pada atasan, tujuan dari

komunikasi ini untuk memberikan umpan balik, memberikan saran dan mengajukan pertanyaan yang memberikan efek penyempurnaan moral dan sikap bawahan.

c. Komunikasi Horizontal

Komunikasi ini adalah pertukaran informasi diantara orang yang tingkatannya sama otoritasnya dalam suatu organisasi. pesan ini biasanya berupa tugas-tugas ataupun tujuan organisasi, penyelesaian konflik dan saling memberikan informasi.

Informasi yang diberikan oleh aparat tentang program kebersihan lingkungan Makassar tidak rantasa didapatkan dari pemerintah yang disampaikan ke kelurahan arus informasi ini mengalir dari pemerintah yang merupakan pimpinan ke kelurahan yang merupakan bawahan (*Downward Communication*) pada umumnya isi informasi tersebut berupa pesan yang berkenaan tentang tugas-tugas dan pemeliharaan aparat kelurahan dalam menjalankan program tersebut. Peran serta kelurahan hanya untuk menjalankan instruksi yang mereka terima dari pimpinan diatasnya.

KESIMPULAN

1. Penjabaran Program Kebersihan Lingkungan Makassar Tidak Rantasa yang dilakukan oleh aparat kelurahan yaitu dengan memahami terlebih dahulu maksud dan tujuan program tersebut dan menyebarkan informasi tentang program tersebut kepada warganya dengan menggunakan Surat imbauan, Poster dan kunjungan langsung kewarganya secara tatap muka.
2. Dalam menjalankan program Makassar Tidak rantasa, Aparat kelurahan cenderung menggunakan komunikasi interpersonal kepada warganya terutama pada tokoh masyarakat yang dianggap lebih efektif dalam penyebaran informasi program kepada warga, adapun bentuk

partisipasi aparat terbagi atas tiga yang mana lurah bentuk partisipasi insentif, sekertaris lurah partisipasi konsultatif dan kasi kebersihan partisipasi pasif.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, A.S. 1990. *Manusia dan Informasi*. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (LEPHAS), Makassar.
- Ardial. 2014. *Paradigma Dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cangara, Hafied. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi* Edisi Kedua. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Creswell Jhon. 1994. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. Saga Publication: London.
- Dwiningrum Siti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Effendy Uchjana Onong. 2003. *Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek*. PT. Remaja Rosdyakarya: Bandung.
- Kohler et al. 1981. *Organizational Communication : Behavioral Perspective*. Holt Rinehart dan Winston : New York.
- Mardikanto. 1994. *Mengukur Tingkat Adopsi dengan Tiga Tolak Ukur*. Surakarta: Sebelas Maret University Pers: Surakarta.
- Mardikanto. 2003. *Redefenisi Penyuluhan*. Jakarta: Penerbit Puspa : Jakarta.
- Morgan, E.P. 1987. *Technocratic Versus Democratic Options for Educational*. Policy Greenwood Press : London.
- Oopen, Mafred. 1988. *"Komunikasi Tepat guna untuk Pengembangan masyarakat Pendekatan ACDC*. P3M : Jakarta.
- Pretty J. 1995. *"Regenerative Agriculture : Policies and Practice for Sustainability and Selfreince*. Earthscan : London.
- Rogers Everet M. & Rekha Agarwala. 1976. *Communication in Organization*. Free Press : New York.

Rogers, Everest M, 1983, *Diffusion of Innovation*, London : The Free Press.

Sugiyah. 2001. *Partisipasi Komite Sekolah dalam Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional di Sekolah Dasar (SD) Negeri IV Wates Kabupaten Kulon Progo*. Tesis : PPS-UNY.

Wright Robert Grandford. 1977. *The Nature of Organization*. Dickenson Publising Company: California

Informan penelitian dalam tabel berikut ini

No	Informan	Jumlah
1.	Teman Diskusi Walikota Makassar	1
2.	Kepala Lurah Pa'baeng-baeng, Tidung, Wajo Baru, Tompobalang, dan Paccerakang	4
3.	Sekretaris Lurah Pa'baeng-Baeng, Tidung	2
4.	Kepala Seksi Pengelolaan Kebersihan Kelurahan Pa'baeng-Baeng	1
5.	Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas kebersihan kota, Dinas Pertamanan dan Kebersihan	1
6.	Kota Makassar Kepala Seksi Pengembangan Partisipasi Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Makassar	1

Sumber: Hasil Olahan Data Primer, 2015